

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah krisis lingkungan yang saat ini dihadapi dunia berawal dari fenomena revolusi industri 1.0 yang mulai terjadi sekitar tahun 1750-an. Tanpa kita sadari, pertumbuhan revolusi industri yang kian berkembang hingga menginjak pada fase 4.0 ternyata telah membebani keseimbangan sumber daya alam dan ekosistem (Dewi, 2017). Akuntansi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan revolusi industri dituding sebagai salah satu faktor penyebab (Azzahra dan Susanto, 2015). Suaryana (2011) menjelaskan bahwa laporan keuangan sebagai produk akhir proses akuntansi konvensional cenderung memperhitungkan dan melaporkan dampak hasil operasi ekonomi perusahaan, namun mengabaikan dampak eksternalitasnya, seperti polusi udara, pencemaran air, penanganan limbah, dan lainnya.

Marina (2009) menggambarkan secara eksplisit bahwa kasus Enron, sebuah kasus yang menjerat perusahaan energi di Amerika Serikat yang berujung pada bubarnya Kantor Akuntan Publik ternama saat itu Arthur Andersen, telah menyurutkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan yang hanya menitikberatkan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Banyak permasalahan lingkungan yang tidak diungkap oleh perusahaan atau hanya sebatas sukarela. Kondisi demikian lambat laun akan menimbulkan efek domino yang berimbas pada kelestarian lingkungan dan mengancam kehidupan manusia di seluruh dunia.

Kesuksesan suatu perusahaan tidak hanya dapat dilihat dari aspek keuangan saja (*single bottom line*), namun juga pada aspek sosial dan lingkungan (Purwanto, 2011). Pergeseran paradigma tersebut memunculkan suatu konsep yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Line Accounting* (TBLA) (Suartana, 2010). Konsep tersebut dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya "*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Elkington mengembangkan konsep tersebut ke dalam tiga bagian yaitu *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*.

Salah satu bentuk implementasi dari konsep TBLA yaitu melalui *carbon accounting*. *Carbon accounting* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kewajiban perusahaan untuk melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan emisi karbon (Irwhantoko dan Basuki, 2016). Istilah *carbon accounting* muncul sebagai bagian dari komitmen Protokol Kyoto dalam memangkas emisi gas rumah kaca. Praktik pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat kita temui pada laporan tahunan (*annual report*) maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Perusahaan umumnya melakukan pengungkapan emisi karbon dengan pertimbangan bahwa dengan adanya informasi ini maka akan memperoleh legitimasi dari pemangku kepentingan dan perlindungan dari berbagai ancaman risiko reputasi dan hukum (Berthelot dan Robert, 2011). Kalu, dkk (2016) berpendapat bahwa kondisi ini akan mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi karbon yang dihasilkan, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Beberapa negara di dunia telah mewajibkan

perusahaannya untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Namun, Dewi, dkk (2019) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi karbon. Choi, dkk (2013) meneliti *carbon emission disclosure* pada 100 perusahaan terbesar di Australia mengindikasikan bahwa tingkat emisi karbon yang diukur berdasarkan *the level of Green House Gas emissions (million t CO₂^e)*, ukuran perusahaan yang dihitung dengan *logarithm of total assets*, dan kualitas *corporate governance* yang didasarkan atas peringkat *Top 250 Australian Firms* dari *Horwath Corporate Governance Report* menjadi faktor kunci terhadap pengungkapan emisi karbon yang diukur dengan menggunakan *checklist CDP (Carbon Disclosure Project)*. *Checklist CDP* ini kerap kali dirujuk oleh para peneliti untuk digunakan sebagai instrumen dalam mengukur luas pengungkapan emisi karbon pada perusahaan di berbagai negara.

Beberapa penelitian lainnya yang meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon perusahaan telah dilakukan oleh Jannah dan Muid (2014); Suhardi dan Purwanto (2015); Kalu, dkk (2016); Akhiroh dan Kiswanto (2016); Guntari dan Yunita (2018); Hermawan, dkk (2018); Wardhani dan Kawedar (2019); dan Kurniawan, dkk (2019). Dewi, dkk (2019) kemudian melakukan penelitian kembali dengan mempertimbangkan karakteristik Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang (*developing country*). Dewi, dkk (2019) mengadopsi penelitian Kalu, dkk (2016) dengan menguji variabel

economic pressure, social pressure, financial market pressure, dan regulatory pressure sebagai determinan *carbon emission disclosure*.

Economic pressure dalam konteks pengungkapan emisi karbon dapat dimaknai bahwa perusahaan yang memiliki kinerja ekonomi baik seharusnya memiliki komitmen yang lebih untuk mengungkapkan informasi karbon. Choi, dkk (2013) berpendapat bahwa perusahaan yang kinerja ekonominya baik cenderung memiliki kemampuan sumber daya yang lebih untuk dapat melakukan pengungkapan sukarela, termasuk pengungkapan emisi karbon. Namun, hasil penelitian Dewi, dkk (2019) mengungkap bahwa variabel *economic pressure* yang diproksikan dengan profitabilitas (*ROA*) tidak mempengaruhi luas pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Choi, dkk (2013); Irwhantoko dan Basuki (2016); Kalu, dkk (2016); dan Guntari dan Yunita (2018), namun tidak mendukung hasil penelitian Jannah dan Muid (2014); Suhardi dan Purwanto (2015); Akhiroh dan Kiswanto (2016); Hermawan, dkk (2018); dan Wardhani dan Kawedar (2019).

Social pressure dalam konteks pengungkapan emisi karbon dapat didefinisikan sebagai permintaan dan harapan masyarakat kepada perusahaan untuk berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon. Salah satu jalan yang dapat ditempuh yaitu melalui pengungkapan yang sifatnya meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan telah memenuhi prinsip lingkungan yang berkelanjutan. Namun, hasil penelitian Dewi, dkk (2019) mengungkap bahwa variabel *social pressure* yang diproksikan dengan kinerja lingkungan melalui peringkat PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup tidak mempengaruhi luas pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Jannah dan Muid (2014); Suhardi dan Purwanto (2015); Akhiroh dan Kiswanto (2016); dan Guntari dan Yunita (2018) mendukung hasil penelitian ini.

Financial market pressure dalam konteks pengungkapan emisi karbon dapat dimaknai sebagai tanggung jawab perusahaan kepada kreditor dalam hal melakukan pengungkapan kinerja baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan (Kalu, dkk, 2016). Secara sederhana, dapat dipahami bahwa perusahaan yang memiliki pendanaan eksternal tinggi dari kreditor memiliki kecenderungan untuk melakukan pengungkapan yang lebih sempit karena akan menambah *extra cost* bagi perusahaan (Luo, dkk, 2012). Hasil penelitian Dewi, dkk (2019) mengungkap bahwa variabel *financial market pressure* yang dihitung menggunakan *debt to asset ratio (DAR)* tidak mempengaruhi luas pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Suhardi dan Purwanto (2015), namun tidak mendukung hasil penelitian Jannah dan Muid (2014) dan Kalu, dkk (2016).

Regulatory pressure dalam konteks pengungkapan emisi karbon dapat dimaknai bahwa pemerintah yang berperan sebagai salah satu *stakeholder* perusahaan memiliki andil untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Pemerintah selalu berupaya untuk dapat bersinergi dengan kelestarian lingkungan serta memiliki kewenangan dalam hal mengawasi perusahaan agar turut serta dalam program-program kepedulian lingkungan melalui pengungkapan emisi karbon (Suhardi dan Purwanto, 2015). Hasil penelitian Dewi, dkk (2019) mengungkap bahwa variabel *regulatory pressure* yang diprosikan menggunakan variabel *dummy* melalui kategorisasi perusahaan BUMN dan Non-BUMN mempengaruhi

luas pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hermawan, dkk (2018) mendukung hasil penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik mengenai pengungkapan emisi karbon pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaannya terletak pada periode penelitian yaitu 2014-2018 serta menambahkan satu variabel baru yang diduga masih sedikit diteliti oleh peneliti terdahulu yaitu *corporate governance mechanism*. *Corporate governance mechanism* (mekanisme tata kelola perusahaan) merupakan salah satu kunci bagi suatu entitas bisnis untuk dapat mempertahankan keberlangsungan bisnisnya (Akhiroh dan Kiswanto, 2016).

Variabel *corporate governance mechanism* dapat diproksikan dengan *managerial ownership* (kepemilikan manajerial). *Managerial ownership* dapat dihitung dari jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen terhadap seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Aniktia dan Khafid, 2015). Dalam perspektif teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan dituntut beroperasi tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan dituntut pula dalam memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan. Adanya manajer sebagai pengelola sekaligus pemilik perusahaan menjadikan pengungkapan informasi apapun yang bersifat positif akan semakin lebih luas.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel independen *economic pressure, social pressure, financial market pressure, regulatory pressure*, dan *corporate governance mechanism* terhadap variabel dependen kualitas pengungkapan emisi karbon. Dari banyak literatur ilmiah, kelima variabel tersebut yang paling relevan untuk diuji kembali dengan berbagai pertimbangan bahwa: (1)

Dewi, dkk (2019) berpendapat bahwa variabel-variabel tersebut selaras dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang bersamaan dengan negara India, Malaysia, Filipina, Nigeria, dalam rangka pengurangan emisi melalui program-program untuk pembangunan berkelanjutan. (2) Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang inkonsisten. Variabel *corporate governance mechanism* yang diprosikan dengan *managerial ownership* merupakan variabel tambahan yang diambil dengan maksud untuk meningkatkan tingkat kebaruan (*novelty*) hasil penelitian. (3) Penelitian mengenai topik pengungkapan emisi karbon masih terbatas, sehingga perlu untuk dikaji dan diuji lebih lanjut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Emisi Karbon Pada Sektor Industri dan Manufaktur”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah penelitian dapat didefinisikan sebagai pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Mengacu pada uraian latar belakang di atas, berikut disajikan poin-poin inventarisasi masalah yang muncul dari penelitian ini.

1. Akuntansi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan revolusi industri dituding membebani keseimbangan sumber daya alam dan ekosistem.
2. Laporan keuangan sebagai produk akhir proses akuntansi konvensional cenderung memperhitungkan dan melaporkan dampak hasil operasi ekonomi perusahaan, namun mengabaikan dampak eksternalitasnya.

3. Beberapa negara di dunia telah mewajibkan perusahaannya untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Akan tetapi, pelaksanaannya di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).
4. Hasil penelitian terdahulu mengenai topik pengungkapan emisi karbon menunjukkan hasil yang inkonsisten, sehingga perlu untuk dikaji dan diuji lebih lanjut.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti memberi fokus penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan emisi karbon dengan objek penelitian menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor *industry and manufacturing*. Sektor ini terbagi atas tiga sub-sektor yaitu *basic industry and chemical*, *miscellaneous industry*, dan *consumer goods industry*. Sektor ini dipilih dengan pertimbangan bahwa sektor industri manufaktur merupakan sektor yang diwajibkan untuk menekan dampak dari emisi karbon mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. Selain itu, sektor ini merupakan sektor yang paling relevan untuk diteliti saat ini mengingat faktor ketersediaan data laporan serta kecukupan jumlah sampel yang memenuhi kriteria.

Instrumen pengukuran luas pengungkapan informasi karbon hanya diukur sebatas ruang lingkup berdasarkan pada indikator yang disusun dan dikembangkan oleh Choi, dkk (2013). Informasi mengenai masing-masing variabel diperoleh melalui laporan tahunan (*annual report*) maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang dipublikasikan pada *website* resmi Bursa Efek

Indonesia (BEI) atau *website* masing-masing perusahaan. Limitasi periode pelaporan dibatasi selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan di atas, secara spesifik pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *economic pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah *social pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah *financial market pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas pengungkapan emisi karbon?
4. Apakah *regulatory pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan emisi karbon?
5. Apakah *corporate governance mechanism* berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan emisi karbon?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini secara spesifik bertujuan:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah *economic pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan emisi karbon.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah *social pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan emisi karbon.

3. Untuk membuktikan secara empiris apakah *financial market pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas pengungkapan emisi karbon.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah *regulatory pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan emisi karbon.
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah *corporate governance mechanism* berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan emisi karbon.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi secara teoritis, praktis, dan kebijakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk membuktikan secara empiris apakah *economic pressure, social pressure, financial market pressure, regulatory pressure, dan corporate governance mechanism* berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan agar hasil penelitian terdahulu yang inkonsistensi menjadi konsisten (ajeg). Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menguji kebenaran dan keselarasan antara *ground theory* yang digunakan pada penelitian ini dengan fakta yang terjadi di lapangan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan tentang pengaruh *economic pressure, social pressure, financial market*

pressure, regulatory pressure, dan corporate governance mechanism terhadap kualitas pengungkapan informasi emisi karbon. Dengan kata lain, manajemen perusahaan yang hendak melakukan pengungkapan emisi karbon atas aktivitas operasionalnya sebaiknya memperhatikan faktor-faktor tersebut.

2) Bagi Bursa Efek Indonesia dan Analisis Pasar Modal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Bursa Efek Indonesia dan analisis pasar modal sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada calon investor untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan. Dengan semakin meningkatnya investor yang selektif berinvestasi pada perusahaan yang ramah lingkungan maka akan meningkatkan kesadaran perusahaan untuk lebih peduli terhadap kinerja berkelanjutan.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*feedback*) serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai sejauh mana kontribusi perusahaan industri manufaktur yang ada di Indonesia dalam mengungkap emisi karbon. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon.